

Judul : Jerat Presiden PKS Dengan UU ITE: Fahri Polisikan Sohibil Iman
Tanggal : Jumat, 09 Maret 2018
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Jerat Presiden PKS Dengan UU ITE

Fahri Polisikan Sohibil Iman

Perseteruan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fahri Hamzah dengan Presiden PKS Sohibil Iman memasuki babak baru. Wakil Ketua DPR ini melaporkan Sohibil ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik, penghinaan serta pelanggaran Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE).

FAHRI tiba di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya didampingi pengacaranya Mujahid Latif, dan koleganya. Fahri mengaku sudah menyiapkan sejumlah bukti dokumen, termasuk elektronik.

Pengaduan Fahri tertuang dalam Laporan Polisi nomor: LP/1265/III/2018/PMJ/Dit. Reskrimsus tanggal 8 Maret 2018. Dalam LP itu, Sohibil yang dilaporkan atas dugaan pelanggaran pasal tindak pidana bidang informasi dan transaksi elektronik, fitnah dan pencemaran nama baik, diduga melanggar pasal 27 ayat 3, 45 ayat 3 UU nomor 11 tahun 2016 tentang ITE juncto pasal 311 dan 310 KUHP.

"Kalau peristiwa ini berlanjut dan berkaitan dengan orang lain, kami tidak tahu nanti. Yang jelas saya fokusnya kepada Saudara Sohibil Iman dulu," kata Fahri usai melaporkan di Polda Metro Jaya, kemarin.

Menurut Fahri, setelah dirinya

menang berkali-kali dalam gugatan perdata melawan PKS terkait pemecatannya, Sohibil masih saja menyampaikan sesuatu yang dianggap merusak reputasinya.

"Tapi beliau terus menerus sampaikan sesuatu yang menurut saya merusak, tidak saja reputasi saya, tapi juga fakta, merusak iklim hukum kita karena dianggap putusan pengadilan meragukan," katanya.

Dia menegaskan, langkah hukum pun harus ditempuh karena Sohibil sudah menganggapnya sebagai pembohong dan pembangkang. "Ini untuk selamatkan partai, loyalitas kader dan tentu ada juga hubungan dengan pribadi saya," kata bekas aktivis asal Nusa Tenggara Barat (NTB) ini.

Dia mengatakan, langkah hukum ditempuh agar kasus bisa ditingkatkan dari persoalan keperdataan menjadi sebuah peristiwa pidana.

"Yang saya laporkan pada tahap awal adalah beberapa pasal



Fahri Hamzah



Sohibil Iman

dalam KUHP, dan juga tentunya dilengkapi oleh dokumen-dokumen yang juga bisa masuk dalam UU ITE," katanya.

Selain barang bukti seperti CD, USB, dan dokumen cetak lainnya, Fahri juga nanti akan mempersiapkan saksi dan ahli untuk memperkuat laporannya. "Sehingga laporan saya lengkap bahwa telah terjadi tindak pidana oleh Saudara Sohibil Iman," ujarnya.

Lanjutnya, Fahri akan cabut laporan, jika Sohibil mundur dari jabatan Presiden PKS. "Itu doa kami sehari-hari. Berdoa saja, semoga hal itu dia lakukan supaya beban partai juga hilang," kata dia.

Selain itu, dia tidak gentar jika nanti Sohibil melapor balik ke Polda Metro Jaya. "Silakan saja, itu saya tunggu juga itu," tandasnya.

Fahri menunggu tindak lanjut dari Polda Metro Jaya terkait laporan yang sudah dilayangkannya tersebut. Dia mengaku siap memberikan keterangan lanjutan jika suatu saat dipanggil lagi oleh Polda Metro Jaya sebagai pelapor.

Fahri juga sudah menyiapkan ahli yang akan memperkuat pelaporannya tersebut. "Ada banyak, saya belum konsultasi ke yang bersangkutan," katanya.

Dia mengklaim sebenarnya ahli banyak memberikan usulan

kepadanya bahwa kasus ini bukan hanya sekadar pencemaran nama baik, fitnah dan pelanggaran UU ITE saja.

Sementara itu, Sohibil menolak berkomentar saat diminta tanggapannya atas laporan Fahri ke polisi. "Tidak ada yang perlu saya komentari," kata Sohibil.

Sebelumnya, Sohibil menyatakan Fahri pernah menyetujui untuk meninggalkan kursi wakil ketua DPR. Hal itu terjadi pada 20 Oktober 2015. Kala itu, kata dia, Fahri setuju dipindah dari posisi Wakil Ketua DPR ke Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP).

"Terus dia bilang, 'siapa ustaz', saya siap mundur dari pimpinan DPR, terserah saya ditempatkan di mana, yang penting saya tetap berada di PKS," kata Sohibil menirukan Fahri.

Dia mengatakan, kala itu Fahri meminta izin untuk angkat kaki dari kursi wakil ketua DPR pada pertengahan Desember 2015. Alasannya, Fahri sudah berjanji untuk bersilaturahmi ke sejumlah pihak sebagai wakil ketua DPR. Sohibil pun menyetujuinya.

"Begitu masuk Desember, enggak mau. Apa itu bukan bohong? Bohong itu namanya dan membangkang namanya," kata Sohibil. ■ REN